

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di dalamnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai aktivitas yang mendukung kemajuan di semua bidang, termasuk dalam hal ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang merupakan tolak ukur pembangunan untuk menilai hasil dari program-program yang telah dilaksanakan serta sebagai panduan untuk pembangunan di masa depan (Kartiasih, 2019).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah infrastruktur. Keberadaan infrastruktur ini sangat berhubungan dengan kelancaran dalam penggerakan serta penyaluran barang dan jasa yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih lancar. Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang krusial dalam mendorong roda perekonomian suatu wilayah. Sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia yang dikutip dalam Maryaningsih, Novi. (2014), infrastruktur secara garis besar terbagi menjadi tiga dimensi utama, meliputi infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, serta infrastruktur administratif. Hal tersebut menyatakan bahwa salah satu jenis infrastruktur yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi adalah Infrastruktur jalan karena sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu wilayah. Jalan yang bagus dan cukup dapat membuat orang bergerak dengan mudah, mengantarkan barang, dan melakukan perdagangan antar daerah. Ketika akses untuk transportasi menjadi lebih baik, biaya pengiriman jadi lebih murah sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih lancar. Hal ini membantu

meningkatkan produktivitas masyarakat serta membuka lebih banyak kesempatan untuk berinvestasi (Syahputra et. al, 2021).

Sesuai dengan teori pembangunan ekonomi, infrastruktur transportasi seperti jalan adalah salah satu faktor kunci yang mendukung peningkatan keterhubungan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ini dengan memfasilitasi pergerakan barang, jasa, dan tenaga kerja, serta mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas. Literatur terkini mempertimbangkan infrastruktur seperti transportasi, listrik, dan jaringan digital sebagai strategi investasi yang dapat meningkatkan permintaan pasar, menarik investasi baru, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat efisiensi dan produktivitas suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Kondisi ini berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Siahay, A. Z. D. 2023).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi

No.	Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi
1.	Sulawesi Tengah	9,89 %
2.	Sulawesi Tenggara	5,40 %
3.	Sulawesi Utara	5,39 %
4.	Sulawesi Selatan	5,02 %
5.	Sulawesi Barat	4,76 %
6.	Gorontalo	4,13 %

Sumber : Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan data makro pada Tabel 1.1, terlihat adanya disparitas laju pertumbuhan ekonomi yang cukup lebar di antara provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi teratas dengan

pertumbuhan ekonomi yang sangat ekspansif mencapai 9,89%, yang sekaligus menempatkannya sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 secara nasional. Tingginya angka pertumbuhan di Sulawesi Tengah ini sebagian besar dipicu oleh fenomena commodity boom dan hilirisasi industri pertambangan nikel skala masif yang menarik investasi asing langsung secara besar-besaran.

Di posisi berikutnya, terdapat Provinsi Sulawesi Tenggara yang tumbuh sebesar 5,40% dan Sulawesi Utara sebesar 5,39%. Kedua wilayah ini juga didorong oleh optimalisasi sektor sekunder dan pariwisata pasca-pandemi.

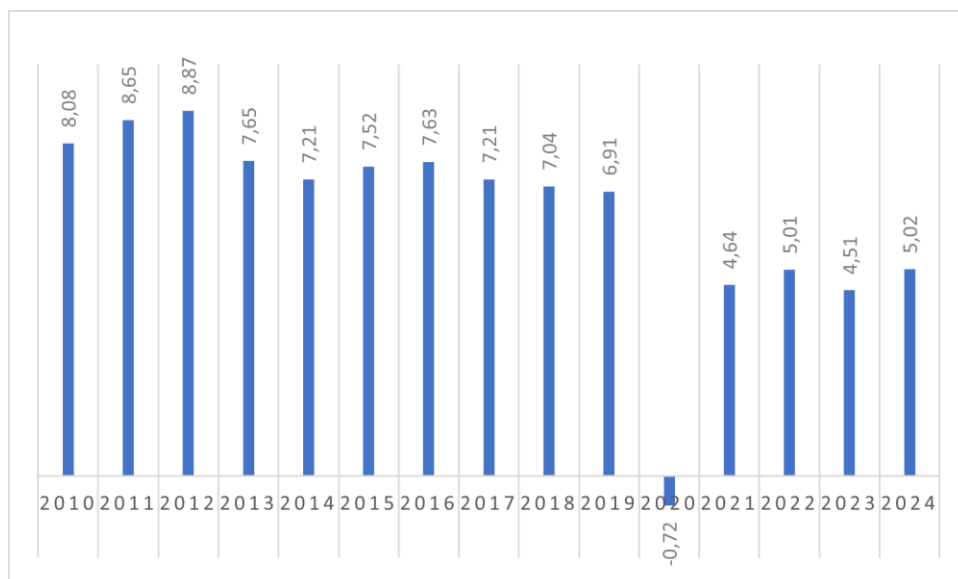
Sementara itu, Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi keempat dengan angka pertumbuhan sebesar 5,02%. Meskipun secara persentase pertumbuhan tahunan Sulawesi Selatan berada di bawah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, posisi Sulawesi Selatan masih berada di atas Provinsi Sulawesi Barat (4,76%) dan Provinsi Gorontalo (4,13%).

Fenomena posisi tengah ini menjadi anomali yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sebagai provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nominal terbesar dan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi, serta memiliki peran strategis sebagai Hub (pusat penghubung) logistik utama untuk Kawasan Timur Indonesia, laju pertumbuhan Sulawesi Selatan yang berada di angka 5,02% menunjukkan bahwa wilayah ini sedang menghadapi tantangan struktural dalam mengonversi modal infrastruktur yang dimilikinya menjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Secara teoritis, jika mengacu pada argumen pertumbuhan endogen modern, infrastruktur publik berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan melalui penurunan biaya produksi marginal dan peningkatan aksesibilitas pasar. Model ekonomi

regional terbaru mengintegrasikan infrastruktur transportasi, digital, dan energi ke dalam fungsi produksi kolektif. Investasi terencana pada jaringan jalan dan kestabilan energi dapat meningkatkan akumulasi modal fisik serta mendorong inovasi di seluruh sektor industri (Liana et. al, 2024). Oleh karena itu, posisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan saat ini menuntut adanya analisis empiris mengenai sejauh mana kontribusi riil dari investasi infrastruktur fisik, transisi energi terbarukan, dan realisasi belanja modal pemerintah daerah dalam mendorong kinerja perekonomian daerah.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (2026)

Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami dinamika signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, ekonomi tumbuh cukup tinggi sebesar 6,91%, mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dan ekspansif sebelum adanya pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi tajam hingga -0,71%, seiring dengan krisis kesehatan dan ekonomi global yang menghambat

aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 4,64%, yang dilanjutkan dengan peningkatan lebih lanjut pada tahun 2022 sebesar 5,10%. Angka ini mencerminkan keberhasilan awal program pemulihan ekonomi dan peningkatan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,51%, namun masih dalam jalur positif dan menunjukkan konsistensi pemulihan (Suhardi, 2025).

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada periode 2020–2024 secara umum mengalami perlambatan akibat guncangan eksternal dan faktor iklim, ketahanan struktur ekonominya tetap terjaga kokoh berkat fondasi kuat dari sektor pertanian, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur.

Berikut adalah tabel data kontribusi (distribusi persentase) dari tiga sektor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tren dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.2 Kontribusi 3 Sektor Utama terhadap PDRB Sulawesi Selatan (%)

Tahun	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan (%)	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi (%)	Konstruksi (%)	Total Kontribusi 3 Sektor Utama
2020	22,19	13,84	14,08	50,11%
2021	22,24	14,35	13,81	50,40%
2022	21,98	14,76	13,67	50,41%
2023	20,44	14,91	14,58	49,93%
2024	19,30	15,00	15,09	49,39%

Sumber Data: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Laporan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha (Seri 2010)*.

Data dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi memegang kendali utama terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Menariknya, sektor perdagangan dan konstruksi terus merangkak naik mendekati angka 15%. Tren positif ini menjadi sinyal kuat adanya

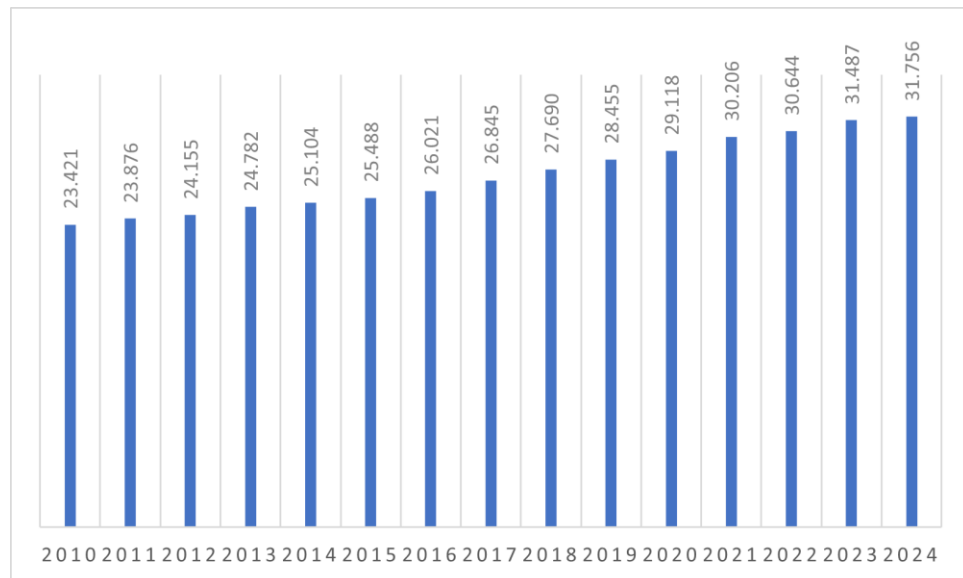
transformasi ekonomi di Sulawesi Selatan yang bergerak semakin maju ke arah sektor jasa modern, penguatan infrastruktur, serta optimalisasi konektivitas perdagangan dalam perannya sebagai hub utama di Kawasan Timur Indonesia. Kendati demikian, akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan ke depan akan sangat bergantung pada efektivitas konektivitas fisik serta arah kebijakan strategis dari pemerintah daerah.

Pergeseran kontribusi sektor-sektor tersebut mengonfirmasi bahwa perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perubahan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Fluktuasi ekonomi yang terjadi mencerminkan adanya pengaruh kuat dari berbagai faktor, baik eksternal seperti dinamika pasar global, maupun internal. Di antara faktor internal tersebut, pembangunan infrastruktur fisik secara masif serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pembangunan menjadi stimulus paling krusial yang diduga kuat memengaruhi arah pergerakan ekonomi daerah..

Perkembangan infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Ketersediaan jalan yang memadai dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan kelancaran aktivitas perdagangan, mendukung perkembangan sektor industri, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur jalan berperan sebagai faktor pendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi

kegiatan ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Yunus et. al, 2024).

Gambar 1. 2 Perkembangan Infrastruktur Transportasi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2026)

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan infrastruktur transportasi, Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2010–2024 yang secara umum mengalami tren peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang relatif stabil, meskipun sempat mengalami gangguan pada tahun 2020-2022 akibat pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010-2021, pembangunan infrastruktur naik dari 23.876 sampai dengan 30.206, yang mencerminkan pembangunan infrastruktur yang stabil sebelum pandemi, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi. Menurut Syahban et al. (2021), pembangunan jalan mempengaruhi

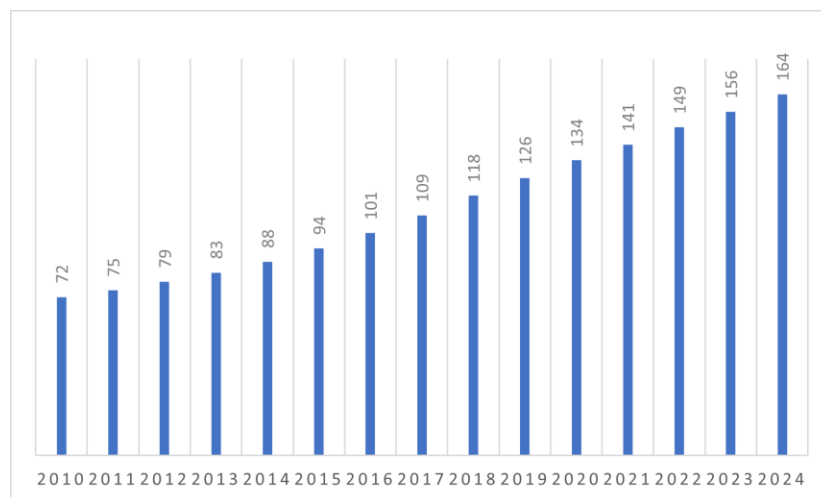
naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena dapat memperlancar kegiatan ekonomi warga. Jadi, semakin baik keadaan jalan di suatu daerah, maka kemungkinan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih besar juga akan semakin tinggi.

Sejak manusia ada dan hidup dalam perkembangan peradabannya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi sangat memegang peranan yang penting baik untuk memobilisasi kebutuhan berupa barang maupun manusia. Demikian pula halnya, pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Untuk tiap tingkatan perkembangan ekonomi diperlukan kapasitas angkutan yang optimum. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan Infrastruktur transportasi yang memadai dapat menekan biaya distribusi dan mempercepat mobilitas barang serta jasa. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi dan memperluas jangkauan pasar. Akses transportasi yang semakin baik juga dapat mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah (Yunus et. al, 2024)

Potensi energi terbarukan sangat besar, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan akan investasi yang signifikan, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran investasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di era net-zero emissions, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan lingkungan dari energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu upaya dalam mendukung

keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang ketersediaannya semakin terbatas. Ketersediaan energi yang stabil dan berkelanjutan sangat penting dalam menunjang kegiatan produksi, khususnya pada sektor industri dan jasa. Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta membuka peluang investasi baru yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah (Firmansyah, Ahwiddhana, and Pramasha, 2024).

Gambar 1. 3 Energi Terbarukan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2024



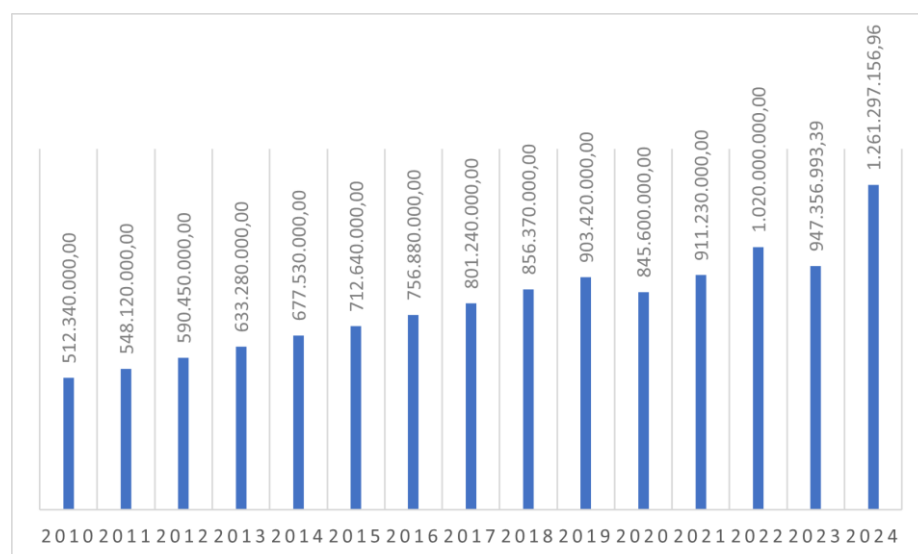
Sumber : Badan Pusat Statistik (2026)

Data menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh bertahap dari 72 MW pada tahun 2011 menjadi 164 MW pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan upaya daerah dalam memenuhi permintaan energi publik sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai sumber daya yang dapat diperbarui secara berkelanjutan—seperti tenaga surya, air, angin, biomassa, dan geotermal—pengembangan energi terbarukan sangat krusial untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil demi menciptakan sistem energi yang ramah lingkungan. Dalam konteks

ekonomi, pasokan energi yang stabil merupakan pilar vital bagi operasional industri, perdagangan, transportasi, dan aktivitas harian masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Maulana et al. (2024) menyatakan bahwa konsumsi listrik dan pengembangan energi terbarukan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional.

Belanja modal daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja modal yang efektif dapat meningkatkan kualitas infrastruktur serta mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, efektivitas belanja modal sangat bergantung pada perencanaan, pengelolaan, serta implementasi kebijakan yang tepat. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja modal tidak selalu diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi apabila tidak dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran.

Gambar 1.4 Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2010-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan data penelitian di atas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011–2024, perkembangan belanja modal daerah menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 realisasi belanja modal daerah tercatat sebesar Rp512,340 miliar, kemudian meningkat secara bertahap menjadi Rp1,261 triliun pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan mencapai angka 845,600 miliar pada tahun 2020 dan 911,230 miliar pada tahun 2021 karena pandemi *Covid-19*. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi telah lama menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja suatu negara atau daerah. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan tidak hanya mencerminkan peningkatan output nasional, tetapi juga menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Para ekonom dan pembuat kebijakan telah lama berdebat tentang instrumen apa yang akan memaksimalkan pertumbuhan dalam konteks pembangunan ekonomi. Belanja pemerintah (*government spending*) dan investasi swasta (*private investment*) adalah dua alat yang menonjol dalam berbagai penelitian. Dipercaya bahwa keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika ekonomi, tetapi efeknya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi negara, struktur institusional, dan seberapa efektif mereka dilaksanakan (Liana et. al, 2024)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah, khususnya dalam bidang seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jika anggaran

dialokasikan secara efektif, pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat fondasi fisik perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik memudahkan distribusi barang dan jasa. Di sisi lain, peningkatan kualitas, Jadi Infrastruktur terus memainkan peran kunci sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, investasi, dan produktivitas nasional. Secara umum, investasi dalam transportasi, energi, telekomunikasi/digital dan infrastruktur sosial telah meningkatkan PDB per kapita, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan aksesibilitas pasar, dengan perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5–2% per tahun (Suhardi, 2025)

Pembangunan jalan tol dan pelabuhan telah mendorong sektor manufaktur dan ritel, sementara perluasan energi dan jaringan digital telah mendorong inovasi teknologi dan e-commerce, dan infrastruktur jalan seperti pendidikan dan kesehatan telah meningkatkan kapasitas manusia untuk pertumbuhan inklusif. jalan tol dan pelabuhan telah mendorong sektor manufaktur dan ritel, sementara perluasan energi dan jaringan digital telah mendorong inovasi teknologi dan e-commerce, dan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan telah meningkatkan kapasitas manusia untuk pertumbuhan inklusif investasi ini, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Berbagai literatur menyoroti perlunya pendekatan terpadu, seperti transisi hijau menuju energi terbarukan, integrasi teknologi, dan kemitraan publik-swasta, untuk mengatasi isu-isu tersebut dan memberikan distribusi manfaat yang merata. Rekomendasi utama meliputi perubahan kebijakan, penilaian dampak jangka panjang menggunakan model ekonometrika, dan fokus pada pembangunan berkelanjutan untuk mendukung

transformasi digital dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 (Rahayu, Putri, and Huda, 2026).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran utama dalam melihat kinerja ekonomi daerah adalah melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang stabil menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan (Yunus et. al, 2024).

Menurut teori *Solow Growth Model*, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk akumulasi modal yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta konektivitas antarwilayah (Suhardi, 2025).

Infrastruktur transportasi memiliki peran strategis dalam memperlancar mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan aksesibilitas antar daerah. Dengan adanya infrastruktur transportasi yang memadai, biaya distribusi dapat ditekan, waktu tempuh menjadi lebih efisien, serta jangkauan pasar menjadi lebih luas. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pembangunan

infrastruktur transportasi menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Ketersediaan energi juga merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam era pembangunan berkelanjutan, pengembangan energi tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya fosil, tetapi mulai beralih ke energi terbarukan. Infrastruktur energi terbarukan memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Dengan adanya pasokan energi yang stabil, kegiatan industri, perdagangan, dan jasa dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi (Suhardi, 2025).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan memiliki potensi ekonomi yang besar di kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, PDRB Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, perekonomian daerah ini kembali menunjukkan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai pertumbuhan yang positif (Yunus et. al, 2024).

Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif lebih berkembang dibandingkan beberapa provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi karena didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, dan distribusi barang yang cukup berkembang. Selain itu, Sulawesi Selatan juga berperan sebagai pusat perekonomian di kawasan Indonesia Timur karena memiliki akses transportasi yang lebih memadai,

seperti pelabuhan, jalan nasional, serta konektivitas antar wilayah yang lebih baik. Kondisi tersebut menjadikan arus distribusi barang dan jasa di Sulawesi Selatan berjalan lebih lancar dibandingkan beberapa wilayah lainnya. Di sisi lain, meskipun memiliki perkembangan ekonomi yang cukup baik, Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur. Beberapa daerah kabupaten masih memiliki keterbatasan akses jalan, transportasi, dan penyediaan energi yang belum merata. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat dan menghambat pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan di Sulawesi Selatan juga masih belum optimal walaupun daerah ini memiliki potensi sumber energi yang cukup besar, seperti tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin. Belanja modal daerah juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah melalui belanja modal diharapkan mampu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik yang dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas penggunaan anggaran pembangunan di setiap daerah masih berbeda-beda sehingga hasil pembangunan yang dicapai juga belum sepenuhnya merata.

Berdasarkan kondisi tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai memiliki karakteristik yang sesuai untuk menganalisis pengaruh infrastruktur transportasi, infrastruktur energi terbarukan, dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel penelitian serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat fenomena yang perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun pembangunan infrastruktur transportasi terus dilakukan, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berlangsung secara merata di setiap daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat berbeda-beda, bergantung pada kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Kartiasih (2019) juga menunjukkan bahwa tidak seluruh indikator infrastruktur transportasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga efektivitas pembangunan infrastruktur masih perlu terus dievaluasi. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dapat dipandang sebagai bagian dari investasi modal yang berperan dalam meningkatkan produktivitas. Infrastruktur transportasi dan energi terbarukan termasuk dalam modal fisik, sedangkan belanja modal daerah merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur transportasi, infrastruktur energi terbarukan, dan belanja modal daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hubungan antara ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu dikaji lebih lanjut secara empiris, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode 2010–2024. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk

menganalisis pengaruh infrastruktur transportasi, infrastruktur energi terbarukan, dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan (Suhardi, 2025).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2010-2024?
2. Bagaimana pengaruh energi terbarukan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2010-2024?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2010-2024?
4. Apakah infrastruktur transportasi, infrastruktur energi terbarukan dan belanja modal daerah secara keseluruhan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2010-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2010-2024.
2. Menganalisis pengaruh infrastruktur energi terbarukan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2010-2024.
3. Menganalisis pengaruh belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2010-2024.

4. Menguji pengaruh infrastruktur transportasi, infrastruktur energi terbarukan dan belanja modal daerah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2010-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai pengaruh infrastruktur transportasi, infrastruktur energi terbarukan, dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis mengenai pengaruh infrastruktur transportasi, infrastruktur energi terbarukan, dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi mahasiswa dan peneliti lain yang ingin mengkaji topik terkait pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran infrastruktur dan belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2024.
3. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur energi terbarukan, dan belanja modal daerah sebagai variabel independen serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.
4. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
5. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya.